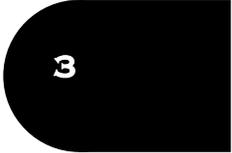




MEMIMPIN MASYARAKAT MANUSIAWI

Albertus Heriyanto



3

Abstract: We are living in a plural community which is being in a process of tranformation: from traditional to a modern society. Culturally, a modern society is characterized by its rationality and its industrial development. Politically we are transforming from a centralised to a more decentralised society, from a repression of a nearly absolut power to an open and free one. I am afraid, we can fall into totalitarianism on one hand, or an anarchism on the other hand. Signs to those directions are real.

To stay away from those extremes, we are suggested to – culturally – arrange a more human community, and – politically – a democratic one. In a human and democratic society, people can activate and optimize all of their potencies, and live in freedom and peace.

Keywords: pluralitas • totaliterisme • anarkisme • demokrasi • masyarakat manusiawi •

Manusia senantiasa merindukan suasana kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan di mana ia bisa mewujudkan diri sepenuh-penuhnya. Masalahnya tidak semua kerinduan itu dapat tercapai. Ada saja kerikil-kerikil yang menghambat langkahnya. Namun justru dalam situasi itulah manusia ditantang untuk melihat kenyataan zaman ini, memahami tantangannya dan memikirkan kembali 'bagaimana menata kehidupan bersama ini, agar sungguh dapat menjadi wahana perealisasi diri?'



Situasi Masyarakat Zaman Ini

Realitas Budaya

Masyarakat zaman ini adalah masyarakat plural, heterogen, bukan tunggal atau homogen. Pluralitas masyarakat – baik dari segi suku, ras, agama, pendidikan, tingkat ekonomi, dan sebagainya – membenteng sedemikian rupa sehingga sisi-sisi yang bertentangan itu membentuk kompleksitas yang sulit dipertemukan.

Masyarakat plural ini hidup dalam situasi perubahan yang berlangsung cepat dan semakin cepat. Hantu yang mengintai manusia dalam konteks ini ialah bertumbuh-suburnya mentalitas instan, sikap materialis dan hedonis. Masalahnya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyadari perubahan yang sedang berlangsung, dan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dalam dinamika ini. Bagi mereka yang sadar akan apa yang sedang terjadi, masalahnya ialah bagaimana mesti berlomba dalam arus perubahan itu.

Sementara itu, banyak orang yang merasa diri serba tertinggal dan kalah dalam persaingan. Ada trauma keterbelakangan: takut ketinggalan zaman. Mereka menuntut percepatan pembangunan, dan semacamnya. Masalahnya, perubahan fisik bisa saja dipercepat sedemikian rupa; yang penting ada uang dan dikelola secara baik, namun perubahan dalam mentalitas adalah hal yang berbeda. Perubahan mental membutuhkan kesempatan untuk memahami situasi yang berkembang, butuh kesempatan untuk menginternalisasi nilai, dan itu berarti butuh waktu. Di satu sisi tanpa kemampuan yang sepadan dengan orang lain maka ia akan kalah dalam persaingan. Persaingan itu sendiri - yang diyakini banyak orang sebagai sebagai ideologi zaman kapitalistik ini - telah menempatkan mereka yang lemah pada sisi korban. Dalam 'tata persaingan' tidak ada tempat bagi kelemahan, tak ada tempat untuk 'tunggu dulu'. Mereka yang berpikir 'sabar, pelan-pelan' akan tertinggal dan menemui banyak kesulitan dalam hidup.

Masyarakat kita, khususnya di perkotaan semakin menghayati kehidupan yang bebas dan terbuka. Sekurang-kurangnya mereka merasa dirinya bebas. Namun, apakah benar, kita sungguh bebas? Kalau kita merefleksikan kenyataan, rupanya kita tidak sepenuhnya bebas. Di tengah perkembangan zaman ini, kita dibelenggu oleh dinamika masyarakat. Manusia zaman ini boleh dikatakan tidak sedang menuju pembebasan, melainkan justru sedang dimanipulasi. Kita tidak sedang menuju suatu arah yang sama, melainkan sedang menyebar, masing-masing menata jalannya sendiri.

Ironisnya, tidak semua orang tahu pasti arah mana yang hendak dituju (*Ibid.*: 27).¹

Kehidupan masyarakat dewasa ini diwarnai pula oleh kegamangan dalam mencari pegangan moral. Salah satu sebab ialah adanya keyakinan bahwa perkembangan dunia haruslah dituntun oleh semangat ilmu pengetahuan. Semangat ilmu pengetahuan ialah 'mencari kebenaran'. Pencarian itu berlangsung terus, tiada henti, sebab manusia tidak pernah puas dengan tingkat kebenaran yang dimilikinya. Di sinilah nampak gairahnya dinamika kehidupan.

Salah satu prinsip yang diyakini oleh manusia yang dituntun oleh semangat ilmu pengetahuan ialah 'apa yang secara teknis bisa dikerjakan, harus dikerjakan'. Masalah menjadi pelik dan menjadi masalah etis ketika prinsip itu meluas ke segala arah. Misalnya, ada sementara kalangan yang berpikir, kalau menciptakan senjata nuklir secara teknis bisa dilakukan, maka senjata nuklir pun harus dibuat. Kalau mengkloning manusia bisa dilakukan, mengapa tidak dilakukan? Maniak ilmu pengetahuan dan teknologi, seolah tidak merasa perlu memikirkan bahwa senjata nuklir itu secara hakiki membelakangi tujuan kehidupan manusia. Apa yang lebih bertentangan dengan tujuan kehidupan, selain upaya untuk meniadakan kehidupan? Bom nuklir, sebagai 'bom' justru mengusung tujuan itu. Mereka yang berkepentingan dengannya tidak peduli bahwa biaya yang sedemikian besar akan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan bila digunakan untuk membantu para saudara yang menjadi korban bencana alam, perang, atau pun korban sistem sosial yang membuat mereka miskin dan terbelakang. Tradisi humanis justru mengatakan, bahwa sesuatu harus dikerjakan karena dibutuhkan manusia bagi kebahagiaannya dan perkembangan akal dan budinya, karena hal itu indah, baik, dan benar (*ibid.*: 33).

Prinsip kedua dari semangat ilmu pengetahuan yang merasuk dalam kehidupan ekonomi ialah meningkatkan efisiensi dan produksi. Pergumulan utama efisiensi ialah dengan modal yang sesedikit mungkin diperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Masalahnya setiap kali efisiensi meningkat, semakin berkurangnya individualitas. Diyakini bahwa mesin sosial akan bekerja lebih efektif efisien bila individu direduksi menjadi unit-unit yang dapat diukur dan kepribadiannya dapat diungkapkan dalam kartu identitas. Dehumanisasi demi efisiensi merupakan peristiwa yang sangat umum. Manusia diperlakukan

¹ Dalam tulisannya Fromm lebih menyoroti masalah budaya, namun dalam konteks politik gejala yang sama pun terlihat jelas. Pola-pola manipulatif banyak digunakan untuk menggiring opini, merekayasa kesadaran masyarakat sedemikian rupa hingga masyarakat tidak mampu lagi menilai secara jernih mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah.

selayaknya mesin produksi, karyawan diperlakukan sebagai aset, dan hanya akan dihargai sejauh keberadaannya menguntungkan. Akibatnya bagi para buruh dan karyawan ialah perasaan cemas, merasa selalu diawasi, dan frustrasi. Gejala yang berkait dengan itu ialah sikap apatis dan kecenderungan untuk memberontak. Meletakkan manusia dalam kerangka sistem semata-mata akan mengantar manusia kepada kejenuhan, cemas, depresi dan tertekan. Akibatnya, imajinasi mereka terjerat dalam patologi psikis, orang menjadi tidak kreatif, pemikiran dirutinkan dan birokratisasikan, dan mereka tidak mampu lagi menghasilkan ide-ide dan solusi-solusi baru yang dapat disumbangkan bagi perkembangan masyarakat secara luas. Selain itu, mereka akan menderita sakit fisik, akibat tekanan kerja yang terlampau besar (*Ibid.*: 34).²

Aspek lain yang berkait dengan efisiensi ialah adanya pandangan bahwa semakin banyak kita berproduksi makin baik. Kesuksesan ekonomi negara diukur melalui jumlah produksi secara keseluruhan. Pertambahan kuantitas secara konstan di segala bidang menjadi tujuan hidup dan ukuran 'kemajuan'. Masalahnya, untuk apa semua pertumbuhan kuantitatif tersebut? Apakah dalam hal ini manusia termasuk dalam pertimbangan pentingnya pertumbuhan? Dalam banyak hal, jika seluruh upaya manusia diarahkan untuk mengejar kuantitas, banyaknya hasil produksi, kualitas hidup kehilangan seluruh arti pentingnya, dan kegiatan-kegiatan yang bermakna pun sirna (*Ibid.*: 37).

Masyarakat kita nampaknya sedang beralih ke masyarakat teknologis-industrial. Masyarakat teknologis-industrial adalah masyarakat yang berskala luas. Kelompok-kelompok kecil dalam banyak hal tidak relevan, karena harus mengintegrasikan diri dalam 'mega-mesin', sistem yang menata jalinan relasi dalam skala yang global.³ Berkait erat dengan perkembangan teknologi ialah meningkatnya otomatisasi. Cara kerja komputer sebagai sistem kontrol semakin menjadi prinsip kontrol utama. Berkait dengan perkembangan ini, masalah yang kita hadapi dalam konteks Indonesia ialah rentang perbedaan antara mereka yang masih sangat tradisional dan sudah sangat modern cukup jauh. Jurang antara yang berpendidikan tinggi dan yang tidak mengenyam

² Karena itulah Fromm menekankan bahwa efisiensi harus melibatkan faktor manusia ke dalam sistem (*Ibid.*: 36). Dalam konteks politik, nampaknya semakin menjadi hal yang biasa di mana penguasa politik memperlakukan rakyatnya sebagai obyek-obyek kekuasaan yang dihargai dan diperlakukan secara baik hanya bila mereka membutuhkan dukungan suara dalam pemilihan umum, atau dianggap tidak mengancam kedudukannya.

³ Boleh dikatakan bahwa tak ada negara yang dapat mengasingkan diri dari perkembangan dan saling ketergantungan dengan negara lain. Dalam masa *booming* harga minyak dunia saat ini kita melihat bagaimana kondisi ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh perkembangan dunia.



bangku pendidikan cukup lebar.⁴ Mayoritas masyarakat kita mungkin sedang berada dalam peralihan dari dunia peramu atau pertanian ke dunia industri tahap pertama yang mengandalkan energi biologis (hewan dan manusia). Sebagian lagi dari dunia industri tahap pertama ke revolusi industri tahap kedua yang mengandalkan energi mekanis di mana sumber-sumber energi seperti uap, minyak bumi, listrik dan atom menjadi dasar perubahan yang fundamental dalam gerak industri. Sebagian kecil lainnya mulai mengenal era digital, era informasi dan otomatisasi. Yang kurang disadari oleh kebanyakan orang dalam perkembangan dunia sekarang ini ialah kenyataan bahwa manusia sesungguhnya bukan sedang menuju puncak pemenuhan dan kebahagiaan, melainkan sedang terhenti menjadi manusia, beralih menjadi mesin yang tidak berpikir dan tidak berperasaan. Yang terlupakan ialah sistem manusia, yakni kodrat manusia sebagai makhluk tidak bisa dan tidak boleh begitu saja ditundukkan (*Ibid.*: 91). Dehumanisasi sedang mengancam (*Ibid.*: 29). Salah satu pengaruh menuju dehumanisasi ini ialah prinsip materialisme-hedonistik (*Ibid.*: 28).

Secara tidak sadar perkembangan masyarakat kita sedang menuju masyarakat mega-mesin, suatu sistem sosial yang diorganisir dan diseragamkan sedemikian rupa, sehingga masyarakat berfungsi sebagaimana mesin, dan manusia sebagai onderdil-nderdilnya. Manusia sedang menuju pengkondisian total, yang berwujud dalam semakin dibutuhkannya komando, kekuasaan, ramalan dan kontrol. Semua itu tidak mesti bersifat politis. Sistem manajemen yang berkembang dalam pelbagai bidang, baik perusahaan-perusahaan jasa, industri, perdagangan dan sebagainya pun membutuhkan komando dan kontrol itu (*Ibid.*: 31). Tanpa itu semua tidak bisa jalan.

Situasi Politik

Secara politik, Indonesia sedang berada dalam proses peralihan - dan jatuh bangun - dari sentralisme ke desentralisme, dari kepemimpinan otoritarian ke demokrasi, dari tata masyarakat tertutup ke tata masyarakat yang lebih terbuka. Kita sedang beralih dari model pendekatan militeristik ke pendekatan dialogal-komunikatif. Secara umum, boleh dikatakan bahwa tekanan politik pemerintah terhadap pihak-pihak yang tak sependapat relatif menurun. Meski tidak sepenuhnya benar, orang meyakini bahwa mengendornya tekanan politik secara langsung merupakan tanda bahwa kebebasan pribadi makin terwujud. Kiranya cukup jelas bahwa di sana-sini proses itu tidak berjalan mulus. Di satu pihak nampaknya pemerintah pusat masih setengah hati untuk menyerahkan

⁴ Meski pun demikian, di zaman instan dewasa ini perlu dicatat bahwa tidak semua yang bertitel berarti cukup cerdas dalam memahami dan memecahkan masalah, sebab banyak sarjana yang memperoleh gelar secara instan atau pun ilegal.



sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah, di lain pihak pemerintah daerah nampaknya belum sepenuhnya tahu apa yang secara konkrit mesti dilakukan dalam mengemban tanggung jawab besar dalam pengorganisasian masyarakat.

Kalangan masyarakat politik nampaknya memaknai masa ini sebagai era keterbukaan dan kebebasan. Ketidakpuasan terhadap pemerintah secara spontan dijawab dengan unjuk rasa, pemalangan dan aksi-aksi lainnya. Ini semacam reaksi atas trauma masa lampau yang menghantui kehidupan: trauma akan terampasnya firdaus kenyamanan dalam lingkungan alam dan budaya yang asli, trauma akan penindasan, baik penindasan fisik, politik, sosial maupun budaya.⁵

Era ini juga dimaknai sebagai era di mana masyarakat asli berhak memperoleh kesempatan untuk ‚menjadi tuan di negerinya sendiri’ dan menduduki posisi-posisi kunci dalam masyarakat. Banyak orang merasa bahwa ‚menjadi tuan’ merupakan keharusan yang tak bisa ditawar-tawar. Orang semakin sadar akan hak-hak dan martabatnya.⁶ Menjadi tuan merupakan perwujudan hak dan martabat.⁷ Ironisnya, yang mewarnai dinamika ini ialah

⁵ Ironisnya kebanyakan orang pribumi di Indonesia merasa diri tertindas di negerinya sendiri. Orang Betawi di metropolitan Jakarta pun merasakan itu, demikian pun orang di pelosok Papua. Bagi sebagian masyarakat asli Papua di kampung-kampung, trauma itu mewujud dalam sikap takut atau was-was akan kehadiran aparat keamanan, sementara di kota-kota kenangan buruk itu direaksi dengan sikap antipati terhadap semua yang berbau militer. Situasi ini oleh sebagian kalangan dimaknai sebagai kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Diakui atau tidak, nampaknya ini membuat pemerintah, baik pusat mau pun daerah tidak dapat berkonsentrasi penuh menata diri dalam kebijakan-kebijakan yang sungguh independen dan terencana. Sangat nampak bahwa sejumlah kebijakan bersifat spontan belaka dan diwarnai oleh kompromi dan keraguan. Contoh mengenai hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan bahwa banyak kebijakan publik tidak didasarkan pada pertimbangan rasional strategis, kebijakan yang sungguh mau menata infra struktur, membuka lapangan kerja yang relatif berjangka panjang dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang muncul justru yang bersifat meninabobokan dan membungkam suara-suara sumbang. Banyak dana – selain dikorupsi – justru digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan non-produktif, mendanai proyek-proyek yang sifatnya tambal sulam.

⁶ Walau pun nampaknya belum cukup diimbangi dengan kesadaran akan kewajibannya. Dalam hal ini proses penyadaran yang berkelanjutan mesti terus dilaksanakan sehingga ideal keseimbangan antara kesadaran akan hak dan kewajiban – sebagai dua sisi dari satu keping mata uang - dapat terwujud.

⁷ Dapat diragukan apakah umumnya orang cukup menyadari bahwa nuansa kata itu sangat feodalistik dan dalam banyak hal tidak cocok lagi dengan gambaran kemanusiaan yang lebih dasar: bahwa semua orang sederajat; bahwa ideal kemanusiaan kita menuntut terwujudnya komunitas kasih yang diwarnai oleh kerelaan untuk berdialog, saling menghargai, saling melayani, ‚tak ada tuan tak ada budak’.



nuansa kehausan akan kekuasaan.⁸ Orang yang merasa dirinya mampu memimpin, menggunakan berbagai cara untuk meraih kekuasaan; tak peduli apakah cara itu legal atau ilegal, etis atau tak etis. Yang juga khas dalam kerangka ini ialah aroma etnosentrisme dan religiosentrisme yang sangat kental. Untuk meraih dukungan, para perindu kekuasaan menarik massa kembali pada akar primordial kesukuan dan keagamaan. Mereka tahu persis bahwa bagi kebanyakan orang – terutama yang kurang berwawasan – sentimen psikologis ini amat peka. Begitu masalah suku, ras dan agama disentuh, banyak orang tidak berpikir lagi soal kemampuan dan integritas moral; yang penting sang calon berasal dari suku saya dan/atau seagama dengan saya.⁹

Totalitarisme dan Anarki: Dua Ekstrim yang Membayang

Kita baru saja lepas dari kekuasaan rezim yang militeristik dan sedang berusaha meredam euforia reformasi yang gegap gempita. Proses penataan kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara sedang berlangsung. Yang masih cukup menggelisahkan ialah jerat kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, yang diiringi dengan ketidakpuasan masyarakat akan proses penataan dan kinerja para pengelola negara yang terkesan lamban dan korup. Ditambah lagi, gerakan beberapa wilayah yang menuntut kemerdekaan. Tegangan antara negara dan masyarakat ini – bila terus berkepanjangan dan tak dikelola dengan baik – boleh jadi berujung pada dua situasi ekstrim yang tak diharapkan: totaliterisme atau anarkisme. Bibit-bibit ke arah itu bukan tidak ada.

Totaliterisme

Menghadapi situasi gamang, godaan untuk menerapkan pola kepemimpinan yang tegas, bahkan kalau perlu keras, tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer, bahkan totaliter, merupakan suatu ancaman tersendiri.

Apa itu totaliterisme? Totaliterisme merupakan suatu sistem pemerintahan yang menuntut agar rakyat tunduk sepenuhnya pada negara, dan umumnya hanya mengakui satu partai yang mengemban tugas sebagai penjaga ideologi resmi yang bersifat totaliter juga. Kalau pun ada beberapa partai lain, sifatnya tidak otonom (Magnis-Suseno, 1991: 310-311).

⁸ Dalam kerangka pikir Nietzschean ini adalah hal yang wajar. Setiap orang – menurut Nietzsche – didorong oleh nafsu untuk menguasai, nafsu untuk menjadi *ubermensch*.

⁹ Kecenderungan sentimen primordial ini didukung pula oleh kenyataan bahwa kebanyakan calon memang tidak sungguh dikenal oleh calon pemilih.



Negara totaliter ialah negara yang bukan sekedar dipimpin oleh kekuasaan elit politik yang despotik¹⁰ atau rezim diktator yang mengontrol secara ketat kehidupan masyarakat, tapi lebih dari itu, suatu sistem politik yang mau mengontrol, menguasai dan memobilisasi segala segi kehidupan masyarakat. Di bawah sang diktator, pemerintahan totaliter memonopoli, mengontrol dan mengarahkan komunikasi massa. Semua majalah, surat kabar dan penerbitan buku, siaran radio serta televisi, pementasan teater maupun film dikontrol oleh pemerintah pusat. Semua penulis, pembicara, aktor-aktris, pencipta lagu atau pun puisi dikendalikan dalam organisasi yang terkontrol. Kehidupan ekonomi pun berada dalam kontrol pemerintah.

Penguasa totaliter tidak hanya mau memonopoli kepemimpinan tanpa gangguan dari bawah. Ia mau menentukan dan mengontrol segala pemikiran dan tindakan masyarakat, hidup matinya rakyat (Arendt, 1995: xi). Seorang pemimpin pemerintahan totaliter akan memberangus siapa saja yang bersuara lain melawan pandangan dan kebijakan pemerintah. Totalitarisme jauh lebih kejam dari despotisme, diktatur atau pun paternalisme yang keras sekali pun.

Totalitarisme selalu mengembangkan lembaga-lembaga politik baru dan menghancurkan semua tradisi sosial, legal, dan politik yang ada. Totalitarisme mengubah kelas-kelas sosial menjadi massa, menggantikan multi partai dengan gerakan massa, mengalihkan kekuasaan dari tentara ke polisi rahasia, mengarahkan politik luar negeri secara terbuka pada kekuasaan dunia (*Ibid.*: xiv-xv). Mereka bukan hanya sering melanggar hak asasi manusia dan menindas, tapi lebih dari itu, merampas hak milik, memfitnah, membunuh, menyangkal hak hidup lawan. Selain itu mereka hampir tidak memperhatikan pertimbangan akal sehat, prinsip manfaat, kepentingan egoistik dan realisme normal (*Ibid.*). Namun bahaya terbesar rezim ini ialah ideologisasi kehidupan politik. Hannah Arendt menegaskan dua ciri hakiki ideologi totaliter. Pertama, totalitarisme mengklaim bahwa dengan berdasar pada ideologi mereka dapat menjelaskan segala-galanya. Kedua, pemikiran ideologis tidak dapat belajar dari atau pun dibantah oleh pengalaman apa pun. Ideologi kebal terhadap sentuhan realitas (*Ibid.*: xxi). Menurut totaliterisme ideologi juga tak mungkin salah. Pemimpin pun tak pernah salah.

Anehnya rezim-rezim totaliter ini senantiasa melahirkan anggota-anggota yang memiliki fanatisme luar biasa. Menurut catatan Arendt, fanatisme ini dihasilkan oleh kurangnya perhatian pada kepentingan diri sendiri dan massa yang bersedia mengorbankan diri (*ibid.*: 71).

Ciri lain dari rezim totaliter ialah gencarnya propaganda tentang kebenaran ideologi dan tindakan yang mereka ambil. Sedemikian lihai mereka

¹⁰ Pemerintahan despotik ialah pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasa absolut yang tidak tunduk pada aturan hukum atau konstitusi apa pun.



melakukan propaganda ini hingga banyak orang terpesona olehnya (*ibid.*: 77).¹¹ Namun propaganda semacam ini tentunya hanya dapat berfungsi pada manusia yang percaya akan takhyul serta imajinasi, dan tidak percaya lagi akan realitas. Propaganda semacam itu tidak mempan di hadapan manusia modern yang hanya percaya pada konsistensi dan akal sehat. Karena itu rezim totaliter membutuhkan dukungan militer yang kuat untuk membungkam mereka yang tidak mempan dibujuk dengan propaganda-propaganda tersebut.

Anarkisme

Setiap masyarakat terancam oleh kekuatan sentrifugal (gerak menjauh dari pusat), dan oleh kekuatan sentripetal (gerak menarik segala sesuatu ke pusat). Dalam gerak yang menjauhan diri dari pusat (sentrifugal) yang berakhir dengan anarki, manusia hanya takluk pada kedaulatan tunggal dari dirinya sendiri, hingga ia menyingkir dari ruang publik tempat kegiatan politik berlangsung (Sugiharto, 2004: 50). Menurut kaum anarkis, adanya kekuasaan politik hanya menghadirkan keterikatan dan kekangan bagi kebebasan individu.

Seorang anarkis sering digambarkan sebagai orang yang biasa melakukan tindakan melawan hukum demi pemikiran politiknya yang ekstrim.¹² Namun, apakah hanya sesederhana itu? Sebenarnya anarkisme adalah sebuah teori (pemikiran sistematis) yang berpendapat bahwa pemerintahan adalah perwujudan kekuatan yang hanya menghambat kebebasan manusia, karena itu mereka melawan segala bentuk pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu bentuk penindasan yang membuat manusia tidak bisa lagi mengungkapkan diri dan mencapai kepenuhan kemanusiaannya. Bagi kaum anarkis, adanya lembaga-lembaga seperti polisi dan hukum pidana, merupakan bukti utama ditekannya kehendak sebagian komunitas oleh sebagian yang lain. Menurut keyakinan mereka, kebebasan manusia bersifat mutlak. Kebebasan adalah kebaikan utama, dan kebebasan dicari dengan jalan langsung menghilangkan semua kontrol yang menindas individu.

Russell menjelaskan bahwa anarkisme bukanlah ajaran baru. Anarkisme telah dikenal sejak sekitar 300 tahun sebelum Masehi dalam ajaran Chuang Tze. Menurut pemikir China ini, manusia demi kodratnya memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur kehidupannya masing-masing; dan dulu orang hidup bersama tanpa keinginan jahat. Mereka hidup dalam harmoni yang alami. Munculnya orang-orang bijak dan kemudian juga para kaisar justru membuat rakyat tersandung pada kasih sekaligus belenggu

¹¹ Mungkin sama lihainya dengan cara masyarakat modern mempengaruhi massa melalui iklan.

¹² Dalam catatan Russell, gambaran ini tidak sepenuhnya benar, sebab ada anarkis yang anti kekerasan. (Lihat Russell, 1977: 44).



untuk memperhatikan orang lain dan berbagai aturan hidup bersama (Russell, 1977: 45-46).

Orang yang umumnya dipandang sebagai bapak pemikiran anarkisme modern ialah seorang penulis Perancis abad ke-19, Pierre Joseph Proudon. Menurutny, segala bentuk otoritas harus disingkirkan dari masyarakat, namun menolak cara-cara kekerasan. Proudon dan para anarkis filosofis berharap bahwa masyarakat akan berkembang secara evolutif dan secara bertahap menuju tata masyarakat anarkis.¹³

Mazhab anarkisme modern lainnya yang mendasarkan diri pada gerakan yang terorganisir dan bahkan tindakan-tindakan teror untuk mencapai tujuannya, lahir dari gerakan kaum sosialis menjelang akhir abad ke-19. Pada Kongres *International Workingmen's Association* di Basel, Swiss, tahun 1869, kaum anarkis yang dipimpin oleh seorang revolusioner Rusia Mikhail Bakunin, dikalahkan oleh kaum sosialis. Tahun 1872 kaum anarkis disingkirkan dari *International Workingmen's Association*. Sejak saat itu sosialisme dan anarkisme sama sekali berpisah, walau pun pada dasarnya mereka sama-sama anti-kapitalis. Kaum anarkis filosofis berbeda dari kaum sosialis dalam tekanan mereka untuk bebas dari kontrol, khususnya kontrol negara. Banyak kaum anarkis yang ikut serta dalam gerakan serikat sekerja (*trade union*). Biasanya mereka menjadi anggota serikat-serikat kaum sindikalis.¹⁴

Anarkisme dalam sejumlah hal penting sama dengan sosialisme, antara lain dalam hal bahwa tanah dan modal harus dimiliki secara komunal. Ajaran ini mula-mula disebut komunisme-anarkis. Pemikiran komunisme-anarkis lahir dari anggapan bahwa modal pribadi adalah sumber tirani oleh individu tertentu terhadap individu yang lain. Berbeda dengan sosialisme ortodoks yang yakin bahwa individu akan bebas jika negara menjadi kapitalis satu-satunya, anarkisme justru khawatir bahwa negara hanya akan mewarisi kecenderungan tiranis dari si kapitalis perorangan. Karena itu anarkisme ingin mengembalikan kepemilikan komunal dan semaksimal mungkin membatasi kekuasaan negara (*ibid.*: 46).

Dalam pemikiran Bakunin negara adalah kekuasaan, kekuatan, dan kekejaman. Bahkan ketika negara memerintahkan sesuatu yang baik, ia sesungguhnya sedang merusakkannya, karena kebaikan itu – sejak diperintahkan – berubah menjadi kejahatan dari sudut pandang kehormatan dan kebebasan manusia. Menurutny, kebebasan moralitas dan martabat

¹³ Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005.

¹⁴ Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. Sindikalisme ialah teori yang berpendapat bahwa pabrik, perusahaan dan sebagainya harus dimiliki dan dikelola sendiri oleh para pekerja.

manusia tercapai justru bila ia bertindak baik bukan karena kebaikan itu diperintahkan melainkan karena ia memikirkannya, menginginkannya, dan mencintainya. Masalahnya, pemikiran Bakunin tidak bulat. Ia tidak memberikan gambaran yang jelas tentang masyarakat yang mau ia bentuk. Selain itu, tidak ada argumen yang membuktikan bahwa masyarakat yang ia tuju itu akan stabil (*ibid.*: 54).

Pemikiran anarkisme yang lebih jelas dapat kita temukan dalam tulisan Pyotr Alekseyevich Kropotkin.¹⁵ Dua tulisan yang sering disebut ialah *Fields, Factory, and Workshops* dan *The Conquest of Bread*. Dalam kedua tulisan itu ia menjelaskan bahwa bila produksi dilakukan dengan lebih ilmiah dan diorganisasi dengan baik, dengan lebih sedikit kerja pun kebutuhan seluruh penduduk dapat tercukupi. Dengan menyerang subyek produksi ia memperlihatkan bahwa ia tahu masalah mendesak yang sesungguhnya, yakni jam kerja yang panjang dan pembagian hasil produksi yang tidak adil. Sistem yang dituju oleh Kropotkin ialah dihapusnya kewajiban kerja dan sistem upah. Menurutnya kerja seharusnya dilakukan secara sukarela dan hasil produksi harus dibagi secara merata bagi seluruh penduduk. Yang perlu dilakukan terutama ialah menjadikan kerja menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban, dan menjadi saluran bagi gejolak hati manusia yang spontan dan konstruktif. Tak perlu ada paksaan, ancaman atau pun pemerintah yang mempraktekkan kekuasaan. Dalam ajarannya, pada umumnya tak ada yang secara mendasar mengandung permusuhan terhadap orang kaya atau penguasa. Namun, sifat umum dari pers anarkis – yang merupakan komponen penting dalam propaganda mereka – dan publik yang kurang bijaksana ialah kecenderungan untuk iri hati kepada mereka yang lebih beruntung dan mengasihani mereka yang kurang beruntung (*ibid.*: 55-56).

Anarkisme sebagai pemikiran filsafat politik dan sebagai gerakan terorganisir perlahan-lahan surut sekitar pertengahan abad ke-20. Namun, salah satu wajah paling aneh dari anarkisme populer – yang jauh dari pemikiran Bakunin maupun Kropotkin yang bersifat konstruktif – ialah tindakan para anggotanya yang tak terorganisir yang cenderung memaksakan kehendak dengan cara-cara yang brutal, penuh kekerasan. Sebagian lagi mendukung cara-cara teror. Walau pun kebanyakan kaum anarkis tidak mendukung terorisme, pandangan masyarakat umumnya mengidentifikasi anarkisme dengan kekerasan.

¹⁵ Seorang aristokrat Rusia yang akrab dengan penjara-penjara di Eropa. Selain Bakunin dan Kropotkin, tokoh penting lain dalam pemikiran anarkisme adalah dua orang Amerika, Alexander Berkman dan Emma Goldman.

Masyarakat Manusiawi: Mungkinkah?

Menghadapi kemungkinan merajanya dua ekstrim tersebut, sejarah telah mengantar kita pada hadirnya pemikiran jalan tengah yang – karena ciri dasarnya – memang selayaknya kita pertimbangkan.

Dalam masyarakat modern yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, jika manusia pasif, jenuh, tidak berperasaan dan terpecah pikirannya maka akan tumbuh simptom-simptom patologis seperti kecemasan, kegelisahan, depresi, kehilangan jati diri, acuh tak acuh terhadap hidup dan bahkan bisa berkembang menjadi jahat. Tantangan utama dalam masyarakat yang dikendalikan oleh sistem ialah bahwa kita dituntun oleh apa yang kita ciptakan dan terobsesi untuk merealisasikan apa yang telah dipikirkan atau direncanakan. Manusia ditundukkan oleh sistem yang diciptakannya. Ketidakmampuan untuk merealisasikan satu bagian dari sistem akan menimbulkan kegelisahan bahkan kemacetan seluruh sistem. Tantangan lain ialah, munculnya kekuatan revolusioner yang mau merombak sistem, yang bisa mewujudkan dalam suatu kediktatoran yang brutal. Jalan ketiga yang perlu dipikirkan untuk meredam kedua ekstrim itu ialah humanisasi sistem. Dengan humanisasi sistem, diharapkan kita semua akan mengabdikan pada tujuan kesejahteraan dan pertumbuhan manusia, memperhatikan secara lebih baik manusia dalam proses hidupnya. Masalah yang penting dalam kerangka ini ialah:¹⁶

- Merencanakan suatu sistem pengorganisasian masyarakat yang didasarkan pada kemanusiaan. Optimalisasi potensi manusia untuk menjadi semakin manusiawi.¹⁷
- Dalam hal ini semua rencana pengembangan masyarakat perlu dibimbing oleh keputusan-keputusan nilai dan norma. Misalnya dalam rencana pengembangan ekonomi, arah utama bukanlah pada peningkatan produksi barang material semata, melainkan terutama pada peningkatan kesejahteraan manusia, yang menyangkut juga kenyamanan dan keamanan dalam kerja, adanya jaminan sosial, daya tarik pekerjaan itu sendiri, hubungan kerja yang manusiawi, dan sebagainya.
- Mengaktifkan manusia dengan meminimalisasi birokrasi yang mengasingkan.¹⁸

¹⁶ Kerangka point 1-4, lih. *Ibid.*: 92-93.

¹⁷ Pemimpin yang baik senantiasa berusaha membuka ruang bagi seluruh rakyat untuk berkembang baik secara fisik mau pun mental, secara emosional mau pun rasional.

¹⁸ Seorang pemimpin yang baik tidak membuat orang lain, entah bawahan atau pun rakyat yang dilayani menjadi seperti robot yang harus taat perintah, tanpa pernah diminta pendapat dan diberi kesempatan untuk berpikir dan memutuskan sendiri apa yang memang baik bagi dirinya sendiri mau pun masyarakat sebagai keseluruhan.

- Merubah pola dasar konsumsi ke arah konsumsi yang meningkatkan keaktifan dan mengurangi kepasifan.¹⁹
- Menumbuhkan bentuk-bentuk orientasi dan kesetiaan psikospiritual baru yang kurang lebih sama dengan sistem religius masa lalu.²⁰

Pemikiran dan tindakan untuk mewujudkan cita-cita besar itu kiranya merupakan suatu pergumulan manusia yang tak pernah selesai. Pertanyaan pokok dalam hal ini ialah, “Bagaimana kita mengorganisasi dan mengelola kehidupan masyarakat?”

Belajar dari Karl Raimund Popper

Popper dalam bukunya *The Open Society and Its Enemy*,²¹ menggali kembali dan menganalisis pemikiran Plato tentang prinsip kepemimpinan. Kami mau mengikuti alur pikir itu, kemudian mengelaborasinya dalam perkembangan pemikiran zaman ini.

Ide pokok pemikiran Plato tentang kepemimpinan (dalam suatu negara) mengacu pada pertanyaan, “Siapakah yang seharusnya memerintah negara?” Jawabannya tentulah mengantar kita pada ‘orang’: golongan terbaik, yang paling bijaksana, yang ditakdirkan sebagai penguasa, orang yang menguasai seni memerintah, dan sebagainya. Dengan mengedepankan berperannya ide-ide kebijaksanaan, Plato berpendapat bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang secara moral baik, adil, mengerti keindahan, kebijaksanaan, kebenaran dan kebahagiaan (Popper, 2002: 151-152). Namun menurut Popper, pertanyaan itu mengandaikan bahwa sejumlah masalah politik yang fundamental telah teratasi. Masalahnya ialah, kita tidak akan selalu menemui penguasa politik yang baik atau bijak, dan dapat dijadikan sandaran kebaikan dan kebijaksanaan. Selain itu menyandarkan diri pada pribadi penguasa, mengandaikan bahwa kekuasaan politik itu secara mendasar tak dapat dikoreksi, tak terbatas, berdaulat penuh. Implikasinya ialah, bagaimana menyerahkan kekuasaan pada tangan-tangan terbaik?

Popper mengeritik pemikiran semacam ini dengan menyebutnya sebagai teori kedaulatan (yang tak terkoreksi), dan teori kedaulatan ini mengandung paradoks, karena siapa yang berkuasa pada akhirnya bisa juga menyerahkan kedaulatannya kepada yang lain, entah kepada hukum, pihak

¹⁹ Pemimpin yang baik juga mampu melihat potensi apa yang ada dalam masyarakatnya dan senantiasa dicerahi oleh keyakinan bahwa dengan potensi-potensi itu rakyat mampu membebaskan diri dari segala belenggu yang mereka alami. Secara instingtif, setiap orang akan berusaha mencari perlindungan bila terancam.

²⁰ Pemimpin yang memberi pencerahan.

²¹ Khususnya bab 7, lihat Popper, 2002 atau Popper, 1973 vol. I, hal. 120-137.

mayoritas, atau apa pun (*Ibid.*: 156). Karena itu Popper mengajak untuk mengalihkan pertanyaan tentang personalitas itu dengan “bagaimana kita bisa mengorganisasi institusi-institusi politik sehingga kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa yang buruk atau tidak kompeten dapat dihindarkan?” (*Ibid.*: 152).

Popper mengemukakan keberatan serius terhadap pertanyaan di atas dan asumsi-asumsi yang menyertainya. Menurutnya, tidak ada kekuasaan politik yang tak pernah dapat dikoreksi, dan sepanjang manusia masih berwujud manusia, tak akan ada kekuasaan politik yang absolut dan tak dapat dikontrol. Tiran yang paling kuat pun bergantung pada polisi rahasia, pendukung setia, dan para algojonya. Itu berarti mesti ada kekuatan politik lain di samping kekuasaannya sendiri, dan ia hanya dapat menjalankan kekuasaannya dengan menggunakan dan menyenangkan mereka. Dengan demikian kiranya jelas bahwa kehendak atau kepentingan satu orang (kelompok) tidak akan bisa mencapai tujuannya bila tidak menyerahkan sebagian tujuannya guna menjinakkan kekuatan-kekuatan yang tak dapat ditaklukkannya (*Ibid.*: 153-154).

Popper berpendapat bahwa setiap teori kedaulatan mengabaikan pertanyaan yang lebih fundamental, yaitu, ‘apakah kita tidak perlu berjuang demi kontrol institusional atas para penguasa dengan memberikan perimbangan atas kekuatannya dengan kekuatan yang lain. Dengan ini, Popper mau mengedepankan teori *check and balance* (*Ibid.*: 154).

Popper juga mengangkat salah satu kelemahan demokrasi, yang oleh Plato disebut sebagai *paradoks kebebasan*, yaitu bagaimana jika masyarakat justru menghendaki seorang tiran untuk memerintah (*Ibid.*: 155). Rupanya sejarah pun mencatat bahwa hal seperti ini bukanlah hal yang mustahil.

Maka pada bagian berikutnya, Popper menawarkan suatu teori yang bukan berpangkal pada kebaikan atau kebenaran intrinsik suatu pemerintahan mayoritas, melainkan suatu teori kontrol demokratik yang prinsip utamanya ialah menghindari dan melawan tirani.

Dalam konteks ini Popper membedakan dua tipe utama pemerintahan. Pertama, pemerintahan yang bisa dibubarkan bukan dengan tanpa pertumpahan darah, melainkan melalui pemilihan umum. Dengan demikian perlu lembaga sosial yang kuat yang dapat digunakan oleh rakyat untuk membubarkan penguasa. Kedua, pemerintahan yang tidak dapat dibubarkan oleh rakyat kecuali lewat keberhasilan sebuah revolusi. Yang pertama sering disebut sebagai demokrasi dan yang kedua tirani. Namun Popper menyarankan agar kita tidak terpaku pada istilah-istilah tersebut (*Ibid.*: 157). Prinsip kebijakan demokratik ialah upaya untuk menciptakan, mengembangkan dan melindungi lembaga-lembaga politik guna menghindari tirani. Maksud utama Popper ialah



bahwa kebijakan yang buruk sekali pun dari prinsip demokrasi sejauh diupayakan demi tercapainya perubahan secara damai, adalah lebih baik dibandingkan kepatuhan pada seorang tiran yang baik hati. Di sini Popper menggarisbawahi bahwa teori demokrasi tidak didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa mayoritaslah yang secara otoritatif harus berada pada tampuk kekuasaan. Yang lebih penting ialah tiadanya tirani dan tersedianya mekanisme kontrol demokratik equalitarian dalam bentuk pemilihan umum, pemerintahan yang representatif dan selalu terbuka terhadap perbaikan, termasuk perlu diciptakannya cara untuk memperbaiki mekanisme kontrol itu sendiri (*Ibid.*: 157-158).

Mengeritik pemikiran Plato, Popper berpendapat bahwa pemikiran tentang 'siapa yang seharusnya memerintah' menggeserkan tanggungjawab akan kesejahteraan negara/masyarakat pada pribadi-pribadi dan bukannya pembangunan kelembagaan yang impersonal. Ini pemikiran yang dangkal. Menurut Popper, semua persoalan politik jangka panjang bersifat institusional (*Ibid.*: 158). Prinsip kepemimpinan tidak menggeserkan masalah-masalah institusional kepada masalah personal. Prinsip ini hanya menciptakan persoalan institusional yang baru. Namun, Popper menegaskan bahwa ini bukan masalah pertentangan antara institusionalisme dan personalisme. Baik institusionalisme murni maupun personalisme murni adalah mustahil. Institusi yang baik baru berfungsi dengan baik bila diisi oleh pribadi-pribadi yang baik.

Menilik Makna Demokrasi dan Hukum

Demokrasi secara sistemik memberikan kerangka institusional bagi reformasi lembaga-lembaga politik. Demokrasi memungkinkan reformasi lembaga-lembaga politik berlangsung tanpa kekerasan, dan lebih menggunakan akal untuk merancang lembaga-lembaga baru dan melakukan penyesuaian seperlunya atas lembaga-lembaga yang sudah ada (*Ibid.*: 159). Pada negara yang tidak demokratis, satu-satunya cara meraih reformasi yang masuk akal ialah dengan menggunakan kekerasan, dan kemudian baru memperkenalkan kerangka demokrasi (*Ibid.*: 160).

Apa yang menjadi ciri masyarakat demokratis? Lyman Tower Sargent menyebut ada 7 elemen kunci demokrasi (1987: 36-66):

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan. Secara langsung keterlibatan itu nampak dalam aktivitas politik, keikutsertaan dalam



pertemuan dan diskusi politik atau secara tidak langsung melalui para wakil yang dipilih dalam pemilihan umum.²²

2. Adanya suatu tingkat kesamaan antara warga negara. Kesamaan sebagai konsep umum terbagi atas lima macam: kesamaan politik, kesamaan ekonomi, kesamaan di hadapan hukum, kesamaan kesempatan, dan kesamaan sosial atau kesamaan martabat.
3. Jaminan atas hak dan kebebasan bagi seluruh warga negara. Tentang hak, termasuk di dalamnya hak-hak kodrati maupun hak-hak sipil. Tentang kebebasan Sargent membedakannya menjadi 7 macam kebebasan yang sekaligus dapat dilihat sebagai hak warga negara: kebebasan untuk memilih, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan bergerak/bertindak, dan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik maupun hukum.
4. Sistem perwakilan di mana wakil rakyat yang dipilih sungguh menghadirkan kehendak rakyat.
5. Peraturan hukum, di mana baik kekuasaan pemerintahan maupun DPR berperan bukan hanya dalam membuat atau merubah hukum, tapi juga terikat pada hukum itu.
6. Sistem pemilihan yang berfungsi sebagai penjamin bagi partisipasi politik dan perubahan kekuasaan politik secara damai. Sistem pemilihan ini sekaligus merupakan mekanisme kontrol rakyat agar mereka yang dipilih benar-benar bertanggung jawab atas kepercayaan pemilihnya.
7. Pendidikan, agar rakyat sungguh mampu menentukan pilihan, sikap, sesuai dengan kepentingannya; mampu menilai, mengevaluasi dan mengkomunikasikan pikiran-pikirannya.

Walau mengandung beberapa kelemahan,²³ sistem demokrasi merupakan suatu sistem yang diidealkan mampu mengelola ketegangan antara terjaminnya kebebasan individu dan pentingnya lembaga hukum dan

²² Dalam konteks Indonesia pantas dicatat beberapa rambu normatif pemilihan umum yang amat bagus bunyinya namun masih jauh dari perwujudannya: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

²³ Antara lain bahwa kita tak dapat mendeteksi motif, kejujuran dan ketulusan hati para calon wakil rakyat atau pun calon pemimpin saat berkampanye. Selain itu tidak ada jaminan bahwa mereka yang terpilih sungguh mampu memahami dan mengakomodasi kepentingan rakyat secara tepat. Sistem mayoritas yang inheren dalam sistem ini sering menjadi batu sandungan dalam wujud tirani mayoritas. (Bandingkan penilaian Russell terhadap sistem demokrasi di Inggris awal abad ini. Russell, 1977: 104-108. Bandingkan juga dengan praktek demokrasi kita sekarang ini).



pemerintahan. Dalam sistem ini diharapkan hak dan kepentingan dasariah seluruh warga dapat terjamin, sehingga individu dapat mengembangkan potensi dirinya seluas-luasnya tanpa terjerat dalam kolektivisme yang membekukan. Dalam demokrasi diharapkan dinamika masyarakat dapat berjalan dalam mekanisme yang tidak dengan mudah dapat dirongrong atau diblokkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kebetulan memegang tampuk kekuasaan.

Salah satu prinsip demokrasi yang mengandung bahaya tirani ialah prinsip mayoritas dalam lembaga perwakilan rakyat. Artinya, tirani tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang penguasa yang kuat, tapi juga oleh suatu kelompok mayoritas yang terlalu kuat dan ekstrim. Masalahnya ialah kecenderungan egoistik yang tidak hanya menjadi penyakit perseorangan tapi juga bisa berjangkit menjadi penyakit kelompok.²⁴ Maka suatu kekuasaan oleh mayoritas dapat dibuat kurang menindas dengan menempatkan keputusan dari semua masalah yang sangat berpengaruh bukan pada tangan penguasa atau pun majelis pusat, melainkan pada suatu wadah yang paling dekat dengan permasalahan itu. Hal-hal yang menyangkut kepentingan sekelompok orang di satu wilayah atau di suatu bidang tertentu misalnya, janganlah diputuskan oleh orang-orang yang tidak secara langsung berkepentingan dengan persoalan itu. Jadi kekuasaan itu berjenjang sesuai dengan cakupan masalah yang perlu diatur. Suatu hal yang bisa dan hanya perlu diatur pada tingkat yang lebih rendah (dalam lingkup yang lebih kecil) tidak perlu diputuskan oleh tingkat yang lebih tinggi (yang lingkup kekuasaannya lebih luas). Inilah yang dimaksud dengan desentralisasi.

Tujuan utama desentralisasi ialah mendekatkan lembaga perwakilan rakyat itu pada kepentingan-kepentingan yang berhubungan langsung dengan keabsahan mereka, yakni kepentingan rakyat.²⁵ Dengan mendekatkan problem aktual masyarakat ke dalam sistem politik, diharapkan dapat mendorong para wakil rakyat maupun pemerintah agar lebih dekat dengan kepentingan rakyat dan sungguh berusaha memecahkan masalah mereka.

Terkait erat dengan sistem demokrasi ialah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hukum dan pemerintahan yang berdaulat perlu tetap ada, namun keduanya perlu dibatasi seminimal mungkin; seperlunya saja. Dalam

²⁴ Terutama kelompok-kelompok ideologis dan fundamentalis. Indonesia saat ini kiranya juga dihadapkan pada tantangan ini.

²⁵ Perlu juga digarisbawahi di sini bahwa sistem perwakilan itu tidak hanya bersifat kewilayahan, tapi juga berkait dengan realitas kesosialan. Itu berarti berkait dengan terwakilinya berbagai kepentingan dasar dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi seperti kaum produsen dan konsumen, manajemen dan buruh, atau pun bidang kehidupan lainnya seperti keagamaan, profesi, dan sebagainya.



pemikiran Russell, kecenderungan untuk berbuat jahat atau mencelakai orang lain merupakan wujud dari ketidaksehatan mental dan kebodohan, kesempitan wawasan. Maka, jalan untuk mengatasinya ialah menciptakan ruang bagi berkembangnya jiwa, dan proses yang sehat bagi semua warga negara. Di sini tujuan kepemimpinan bukan terutama kekuasaan, melainkan tugas pelayanan. Seorang pemimpin bukan ada untuk kemegahan diri di singgasana kekuasaan²⁶ melainkan untuk menjamin bahwa pengorganisasian masyarakat berjalan dengan baik. Pemimpin ada untuk menjamin bahwa hukum berfungsi, agar yang lemah tidak ditindas oleh yang kuat, yang bodoh tidak dibodohi oleh yang lebih pandai. Ia menjamin bahwa hasil produksi dapat dinikmati oleh semua yang berhak.

Magnis-Suseno menjelaskan pentingnya hukum ini dengan berangkat dari ciri dasariah manusia sebagai makhluk yang berakal budi, serta sisi kehidupannya yang jasmaniah dan sosial. Manusia adalah makhluk berakal budi. Karena itulah kelakuan manusia diatur secara normatif, bukan secara naluriah saja. Manusia adalah juga makhluk jasmaniah, dan karena itu ia membutuhkan benda-benda material untuk hidup. Manusia dapat ditindas dan ditaklukkan justru karena ia adalah makhluk jasmaniah. Manusia juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia hanya dapat mewujudkan diri dalam kebersamaan dengan orang lain. Kombinasi antara sifat jasmani dan sosial ini dalam perwujudannya membuka kemungkinan konflik. Jadi, fungsi hukum yang paling dasar ialah mencegah agar konflik kepentingan tidak didasarkan pada kekuatan atau kelemahan pihak-pihak yang berkonflik melainkan atas dasar kepentingan dan nilai obyektifnya (Magnis-Suseno, 1991: 76-77). Jadi, intinya agar kebenaran dan keadilan ditegakkan.

Selain itu pentinglah pula kita menyadari bahwa tujuan utama hukum bukanlah untuk membuat mereka yang bersalah itu menderita dan kehilangan harga dirinya. Dalam lingkup penghargaan akan hak-hak asasi manusia, konsep penghukuman telah beralih. Penjahat atau orang yang bersalah seyogyanya diperlakukan sebagai orang yang sakit dan membutuhkan perawatan dan pengobatan. Jadi, tugas dan fungsi proses penghukuman ialah mengantarkan orang pada proses kesadaran akan kesalahannya, tidak mau mengulangi lagi, dan mampu mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapinya (Russell, 1977: 102).

²⁶ Sejarah mencatat bahwa suatu kepemimpinan yang berorientasi pada kemegahan dan membudak pada ideologi, hanya berujung pada penghancuran kemanusiaan. Alexander Agung: penghancuran budaya sekitar Mediterania dan Asia Kecil. Hitler: pemusnahan ras Yahudi di Eropa. Cita-cita Jepang untuk menguasai Asia Pasifik: romusha.



Kebebasan dan Pengembangan Diri: Suatu Tinjauan Budaya

Dalam era sekarang ini nampak bahwa manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia karena menjadi budak bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebanyakan orang harus tenggelam dalam persaingan, dan untuk itu mereka banyak kehilangan hal yang menjadi tujuan hidupnya: waktu-waktu luang yang dapat dinikmati dengan gembira. Kondisi yang lebih buruk terjadi di lapisan bawah manakala mereka harus membanting tulang hampir sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk itu, anak-anak pun harus kehilangan masa kanak-kanak dan remajanya. Boleh dikatakan bahwa kehidupan ini sendiri kehilangan gairah dan daya tariknya karena tidak banyak menyediakan ruang bagi manusia untuk mengekspresikan kekayaan kodratnya. Orang tidak lagi berkesempatan untuk hidup menurut gerak hatinya yang kreatif, karena hampir seluruh energi digunakan untuk berjuang agar tidak kelaparan dan tidak kalah dalam persaingan (*ibid.*: 131).

Persaingan itu sendiri tidak buruk, karena pada dirinya persaingan tidak bertentangan dengan keadilan dan kebebasan. Masalahnya terletak pada kondisi-kondisi dasar yang dibutuhkan untuk terselenggaranya persaingan yang sehat dan adil. Dalam konteks inilah kita membutuhkan orang-orang yang memiliki visi dalam menata dunia kerja agar semakin manusiawi: membuka peluang kerja dan usaha, menjamin ketenteraman kerja dan, memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja – terutama – kaum buruh. Meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak kurang pentingnya ialah menata hubungan yang manusiawi antara majikan dengan para pekerjanya serta hubungan antarsesama pekerja.

Hal yang juga membutuhkan penanganan segera ialah pendidikan.²⁷ Kenyataan membuktikan bahwa selaras dengan berkembangnya kemampuan intelektual dan ketrampilan, taraf kehidupan pun relatif membaik. Perkembangan dunia menunjukkan bahwa semakin hari semakin dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian; dan justru dalam dunia kerja yang menuntut keahlian kebanyakan orang dapat mengalami kerja sebagai wahana pengungkapan diri. Sebut saja antara lain dunia kerja kaum ilmuwan, kaum professional, atau pun seniman.

Kita juga membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang sepenuhnya menjamin kebebasan berekspresi. Artinya, kita tidak menghendaki adanya sistem yang bersifat otoriter, totaliter, despotik dan semacamnya. Dalam pemerintahan semacam itu segala bentuk karya ilmu pengetahuan, karya seni, dan segala bentuk ungkapan pemikiran dan perasaan tidak boleh berseberangan dengan kebijakan dan kepentingan pemerintah. Tak ada tempat

²⁷ Namun perlu dicatat bahwa dalam prinsip negara demokratis, negara bukanlah pemegang otoritas dalam pendidikan moral. (Popper, 2002: 164).



bagi perbedaan pendapat dengan mereka yang berkuasa; apalagi kritik atau pun kontrol.²⁸ Dalam hal ini pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang memerdekakan, kepemimpinan yang mampu memaksimalkan perannya dalam melindungi hak-hak rakyat terhadap kemungkinan tirani. Hanya dalam suasana merdeka manusia bisa berkembang dan bisa saling mencintai. Cinta itu harus merdeka dan memerdekakan. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang juga menghargai kemerdekaan orang lain. Jadi, tidak hanya untuk kelompoknya sendiri dan tidak semata-mata sendiri, melainkan secara suka rela membatasi diri pada batas-batas yang sewajarnya. Dalam kehidupan sosial, batasan itu antara lain ialah kebebasan orang lain.²⁹

Ideal kemerdekaan tentulah bukan sekedar kemerdekaan formal, melainkan kemerdekaan riil, nyata. Bukan hanya kemerdekaan politis, melainkan eksistensial humanistik, kemerdekaan yang dirasakan dan mewujudkan dalam kehidupan konkrit. Kemerdekaan dalam artian sebagai sesuatu yang menyatu dalam hakekat kemanusiaan kita. Merdeka berarti tidak ada rasa takut, entah takut miskin, takut digusur, dicurigai, diculik, dibunuh dan seterusnya. Lebih dari itu, suatu kemerdekaan jiwa untuk tidak takut berkata jujur, benar, dan bertindak adil; tidak takut dikritik. Selama manusia masih mengalami ketakutan, manusia belum merdeka.

Dalam konteks ini pemerintahan baik ialah pemerintahan yang komunikatif. Tugas berat seorang pemimpin ialah membuka ruang bagi partisipasi aktif warga. Kepasifan merupakan pertanda buruk bagi kemanusiaan dalam suatu kelompok masyarakat (*Ibid.*: 91). Terjaminnya komunikasi dialogal dan setara antarberbagai pihak yang berkepentingan terhadap persoalan bersama kiranya akan membuka ruang yang cukup bagi kebebasan berekspresi. Kebebasan mengungkapkan diri ini amat penting dalam menjamin tetap tingginya kreativitas dan pemikiran inovatif. Pemimpin yang baik bersikap

²⁸ Penolakan ekstrim atas pemerintahan totaliter absolut ialah yang diserukan kaum anarkis sejak pertengahan abad ke-19 melalui Prodhoun, Bakunin, Kropotkin dan para pengikutnya.

²⁹ Dalam kerangka pembahasan tentang demokrasi, Carol C. Gould menyorot juga masalah kebebasan sebagai landasan bagi pengembangan diri. Menurutnya kebebasan bukan hanya soal tiadanya gangguan dari luar dan tiadanya halangan dalam mewujudkan kehendak dalam kebebasan politik. Lebih penting dari itu ialah kondisi yang memungkinkan orang untuk bertindak bebas dan kemampuan untuk melakukan pilihan tepat dalam proses pengembangan diri. Jadi, yang penting dalam hal ini ialah kondisi obyektif yang diperlukan untuk menentukan suatu pilihan. Secara konkrit itu berarti - antara lain - tiadanya kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan membuat kebebasan tidak berguna (lihat Gould, 1993: 34-58). Karena itu pendidikan sebagai proses pencerdasan budi dan nurani (bukan sekedar proses alih pengetahuan) kiranya merupakan hal yang tak terelakkan.



egaliter,³⁰ tidak merasa dirinyalah yang paling hebat dan paling benar, atau tahu dan mampu menangani segala-galanya tanpa keterlibatan pihak lain. Masyarakat modern adalah masyarakat yang cenderung makin rasional dan ingin terlibat dalam hal yang berkait langsung dengan kepentingannya. Pemimpin yang baik justru bersikap akomodatif, mendengar dari semua pihak dan bertukar pikiran dengan sebanyak mungkin orang, agar mampu menangkap masalah dan mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Ia terbuka, peka terhadap kritik dan masukan. Menurut Popper satu-satunya kelemahan orang yang tidak terdidik ialah ketidakmampuan untuk mengkritik dirinya sendiri (*Ibid.*: 163). Dengan kata lain, ciri yang lekat padanya ialah 'kebijaksanaan'. Karl Popper malah mengatakan bahwa pemimpin negara atau pun masyarakat sebaiknya memang seorang 'filsuf' dalam artian yang dasarnya: pencinta dan pencari kebenaran. Tidak perlu bahwa ia seorang filsuf profesional. Yang lebih penting adalah seorang yang senantiasa berusaha 'mencari yang benar' dan berusaha untuk selalu meletakkan kebenaran pada tempat yang paling fundamental bagi setiap keputusan dan tindakannya (*Ibid.*: 166).



Daftar Rujukan:

- Arendt, Hannah. 1995. *Asal-usul Totalitarisme – Jilid III Totalitarisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Rajawali.
- Fromm, Erich. 1996. *Revolusi Harapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hegel, G.W.F. 2001. *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. *Etika Politik – Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.
- Popper, Karl R. 1973. *The Open Society and Its Enemy, Volume I, The Spell of Plato dan Volume II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath*. London: Routledge & Kegan Paul.

³⁰ *Equalitarian*: lihat Popper, 2002: 161 dst.



Popper, Karl R. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya*. Terj. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Russell, Bertrand. 1977. *Roads to Freedom*. London: Unwin Paperback, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd. First Published in Unwin paperbacks.

Sargent, Lyman Tower. 1987. *Contemporary Political Ideologies*. California: Brooks Cole Publishing Company. Seventh edition.

